

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awalnya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Sejak masa kemerdekaan hingga era Orde Baru, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lalu diangkat oleh presiden atau menteri dalam negeri. Sistem ini didasarkan pada beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang memberikan wewenang besar kepada DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu, pemerintahan masih sangat terpusat, dan masyarakat belum memiliki peran dalam memilih pemimpinnya secara langsung (Sinaga, 2018).

Setelah reformasi 1998, mulai muncul dorongan kuat dari masyarakat agar pemimpin daerah bisa dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan besar terjadi pada tahun 2005, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pilkada langsung. Hal ini didasarkan pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Tujuan dari perubahan ini adalah agar kepala daerah benar-benar merupakan pilihan rakyat, sehingga diharapkan akan lebih akuntabel dan mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan dan sesuai kebutuhan rakyat (Zulfajri et al., 2020).

Kemudian, sejak tahun 2015, pemerintah mulai menerapkan sistem Pilkada serentak di berbagai daerah. Artinya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara bersamaan di banyak wilayah dalam satu waktu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, menstabilkan dinamika politik, serta memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkada serentak ini, partisipasi masyarakat semakin besar, dan proses pemilihan menjadi lebih terbuka, sehingga kepala daerah

yang terpilih diharapkan benar-benar terpilih berdasarkan suara mayoritas warga di daerah tersebut (Zulfajri et al., 2020).

Pelaksanaan Pilkada langsung menjadi momen penting bagi rakyat di daerah untuk menilai dan memilih calon pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan mereka. Di sisi lain, kontestasi ini juga menjadi ajang bagi para aktor politik untuk menunjukkan kapasitas dan strategi mereka dalam meraih kepercayaan publik. Namun, pelaksanaan Pilkada juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Berbagai persoalan seperti politik uang, *black campaign*, mobilisasi birokrasi, serta dominasi elite politik lokal kerap mewarnai proses kompetisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi dalam pemilihan di tingkat lokal masih dalam tahap berkembang dan belum sepenuhnya berjalan dengan matang secara isi dan kualitasnya (Samhudi & Hibaturrahkim, 2024).

Secara umum, dinamika politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak sekadar menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan di tingkat daerah. Kepala daerah yang terpilih tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga memiliki wewenang atas anggaran, arah pembangunan, dan akses terhadap jaringan ekonomi maupun politik di daerah. Dengan kata lain, hasil dari Pilkada sangat menentukan peta kekuasaan lokal selama lima tahun ke depan, dan sering kali berdampak pada hubungan antaraktor politik seperti partai, birokrasi, pengusaha, hingga organisasi masyarakat (Syarif & Prabowo, 2018).

Khususnya di Provinsi Banten, dinamika kontestasi politik juga memiliki karakteristik tersendiri yang cukup kompleks. Beberapa wilayah di Banten memiliki sejarah panjang dalam praktik patronase politik dan pengaruh keluarga dalam kekuasaan. Kabupaten Serang tidak terlepas dari fenomena ini, yang menjadikan Pilkada 2024 sebagai ajang yang menarik untuk dicermati. Setidaknya ada dua hal yang membuat kompetisi politik kali ini menjadi berbeda. Pertama, munculnya persaingan antara tokoh-tokoh lama yang sudah memiliki basis pendukung dan jaringan kuat, dengan tokoh-tokoh baru yang mencoba menawarkan gaya kepemimpinan yang lebih segar. Kedua, adanya perubahan perilaku pilih,

khususnya dari kalangan muda, yang kini cenderung menginginkan pemimpin yang terbuka, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan sehari-hari (Djuyandi et al., 2024).

Selain itu, peta politik di Kabupaten Serang juga dipengaruhi oleh dominasi partai-partai tertentu di parlemen daerah. Hal ini berpengaruh pada proses pencalonan kepala daerah, karena dukungan partai sering kali tidak lepas dari berbagai pertimbangan seperti tingkat elektabilitas, popularitas kandidat, loyalitas politik, dan kesiapan logistik kampanye. Dengan demikian, proses seleksi kandidat kepala daerah tidak sepenuhnya terbuka, tetapi tetap ditentukan oleh dinamika politik internal dan kesepakatan antar elite lokal.

Pilkada Serang 2024 juga berlangsung dalam situasi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Banyak warga masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, janji-janji kampanye yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat menjadi modal penting bagi para calon untuk meraih dukungan. Di sisi lain, penggunaan media sosial dan teknologi digital semakin intens dimanfaatkan untuk menjangkau pemilih, terutama kelompok muda yang lebih aktif secara daring.

Dari pengamatan awal persaingan politik dalam Pilkada Serang 2024 terlihat cukup ketat, tetapi belum semua calon membahas isu-isu penting yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebagian calon masih mengandalkan popularitas dan jaringan yang sudah ada, sementara yang lain mencoba mendorong perubahan melalui gagasan baru dan keterlibatan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di Kabupaten Serang dihadapkan pada pilihan politik yang beragam, dan jalannya Pilkada menjadi cerminan bagaimana demokrasi lokal berjalan di tengah kondisi sosial-politik yang kompleks (Siti Murfatiah, 2025).

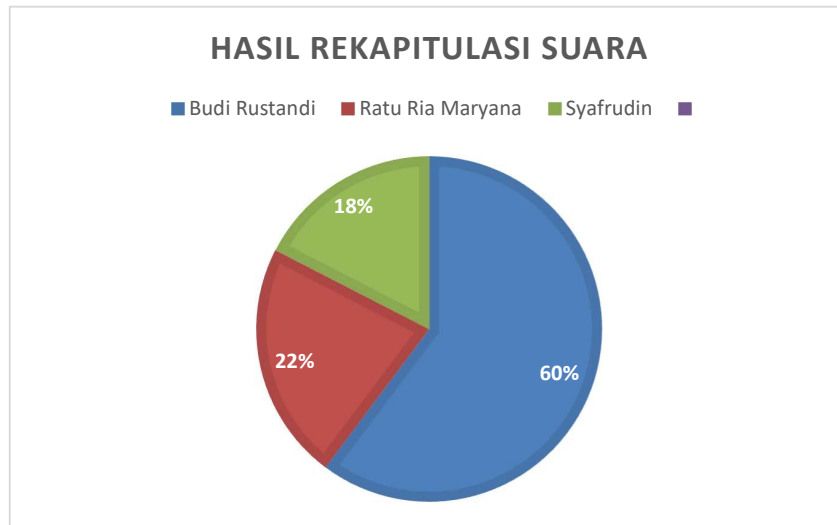
Budi Rustandi sebagai salah satu kandidat yang menarik perhatian publik dan juga telah lama dikenal dalam dunia politik lokal di Kabupaten Serang. Sebelum

mencalonkan diri sebagai bupati, ia aktif sebagai anggota DPRD dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang. Melalui pengalaman politik yang cukup panjang, Budi dikenal memiliki jaringan kuat di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan dan basis-basis pemilih tradisional. Sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra, Budi Rustandi juga dikenal dekat dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari kelompok tani, tokoh agama, hingga pelaku UMKM. Pendekatannya yang komunikatif dan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat menjadikannya sebagai figur yang cukup diterima di banyak kalangan. Dalam kampanye Pilkada 2024, Budi Rustandi menonjolkan isu-isu perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal berbasis desa. Ia juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan mengemas pesan-pesan kampanyenya secara lebih inklusif dan menarik. Pengalaman legislatif, dukungan partai besar, serta kemampuan membangun komunikasi politik yang efektif menjadi modal utama Budi Rustandi dalam memenangkan Pilkada Serang 2024. Hal ini menjadi titik masuk yang relevan untuk menganalisis bagaimana strategi politik yang ia gunakan dalam meraih dukungan mayoritas pemilih (Lingga Yonita, 2021).

Pada Pilkada Serang 2024 yang diikuti oleh beberapa tokoh penting, termasuk Budi Rustandi (didukung oleh Partai Golkar), Ratu Ria Maryana (didukung oleh PDIP), dan Ubaidillah (didukung oleh PKB). Berdasarkan hasil sementara rekapitulasi suara dari KPU, Budi Rustandi meraih 60,28% dengan perolehan suara 212.283, disusul oleh Ratu Ria Maryana dengan 22,31 perolehan suara 78.557, dan Syafrudin 17,42 persen perolehan 61.348 suara. Data ini menunjukkan bahwa Budi Rustandi unggul secara elektoral, namun selisih suara yang tidak terlalu besar menunjukkan kompetisi yang cukup ketat (KPU, 2024).

Persaingan antarcalon dalam Pilkada juga menunjukkan adanya perubahan dalam selera atau pilihan masyarakat. Kampanye yang menargetkan pemilih muda, janji pembangunan infrastruktur, dan upaya melibatkan masyarakat secara aktif menjadi isu-isu utama. Selain itu, penggunaan media sosial secara intens oleh para kandidat semakin memperkuat komunikasi langsung antara calon dan pemilih.

Dalam konteks ini, Pilkada Serang 2024 bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, tetapi juga menjadi ajang penting untuk melihat bagaimana demokrasi berjalan di tingkat lokal. Persaingan antara tokoh-tokoh lama dan pendatang baru, peran partai politik, serta dinamika pemilu di tengah tantangan sosial dan ekonomi menjadikan Pilkada ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam hal strategi yang



*Gambar 1. 1 Diagram Hasil perolehan suara KPU diolah oleh peneliti*

digunakan para calon untuk menarik dukungan Masyarakat (Lingga Yonita, 2021).

Gambar 1.1 menunjukkan kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap dinasti politik sudah berkembang dan memiliki bermacam-macam reaksi. Persepsi masyarakat mengenai dinasti politik ber-aneka ragam golongan, mulai dari mayoritas usia 17-21 tahun (49,3%), diikuti 22-30 tahun (30%), 31-40 tahun (13,3%), dan >40 tahun (7,3%). Dominasi usia muda menunjukkan mayoritas pemilih pemula/muda yang kritis dan memiliki akses informasi luas. Data diambil secara sampling di Kabupaten Serang guna menilai tentang eksistensi dinasti politik di Serang. Terdapat 160 responden yang diraih dari total 29 Kecamatan di Kabupaten Serang (Al Alim & Herawati Retno, 2024).

Data tersebut menyatakan bahwa 69% responden menyatakan kurang hingga tidak percaya terhadap estafeta kepemimpinan oleh dinasti politik. Mayoritas menilai pemerintahan yang dikuasai satu keluarga kurang kredibel dan

tidak mencerminkan prinsip demokrasi sehat. 48% responden pernah mengalami momen/peristiwa tertentu yang mempengaruhi respon emosional mereka terhadap dinasti politik ketidakpuasan kebijakan, pelayanan publik, dan kerja nyata politik. Evaluasi masyarakat dipengaruhi kombinasi pengalaman historis, ekspektasi politik, dan eksposur narasi publik. Mayoritas menuntut pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan terbuka terhadap partisipasi politik di luar lingkaran keluarga elite (Al Alim & Herawati Retno, 2024)

Dampak dinasti politik yang tidak dapat memuaskan pilihan masyarakat dapat menyebabkan penilaian dari masyarakat. Hakikat masyarakat terhadap kandidat atau parpol yang memiliki kinerja buruk maka masyarakat akan memberikan *reward* dan *punishment* yakni masyarakat tidak akan memilih kembali kandidat atau parpol yang mengecewakan pemilih (Firmanzah, 2008).

No	Kecamatan	Ria-Subadri	Budi-Agis	Syafrudin-Heriyanto
1	Serang	23.594	70.996	18.826
2	Cipocok Jaya	14.208	27.283	10.673
3	Curug	7.136	17.167	4.664
4	Walantaka	13.555	27.178	11.027
5	Kasemen	10.323	42.137	5.881
6	Taktakan	9.611	27.500	10.375
7	Total Suara	78.607	212.262	61.446

Tabel 1. 1 Hasil Perolehan Suara Pilkada Kota Serang 2024

Berdasarkan data perolehan suara Pilkada Kota Serang 2024 Tabel 1.1, pasangan calon nomor urut 2, Budi Rustandi–Nur Agis Aulia, yang bukan berasal dari dinasti politik, berhasil unggul signifikan di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Serang, Budi–Agis memperoleh 70.996 suara, mengungguli Ratu Ria Maryana–Subadri Ushuludin dengan 23.594 suara dan Syafrudin–Heriyanto 18.826 suara. Pola kemenangan ini juga terlihat di Kecamatan Cipocok Jaya (27.283; 14.208; 10.673), Curug (17.167; 7.136; 4.664), Walantaka (27.178; 13.555; 11.027), Kasemen (42.137; 10.323; 5.881), dan Taktakan (27.500; 9.611; 10.375). Secara

total, Budi–Agis meraih 212.262 suara, sedangkan Ria–Subadri memperoleh 78.607 suara dan Syafrudin–Heriyanto 61.446 suara (KPU, 2024).

Hasil ini memaparkan bahwa kandidat yang tidak diusung oleh dinasti politik mampu memegang kendali kemenangan suara. Kekuatan koalisi partai dan figur kandidat baru terbukti mampu mengalahkan partai serta tokoh yang telah lama berkuasa di Kota Serang. Keunggulan hasil konsisten di semua wilayah menunjukkan adanya strategi politik yang terencana dengan baik, mulai dari penguatan basis dukungan partai, pemanfaatan jejaring relawan, hingga pendekatan langsung kepada masyarakat. Fenomena ini menjadikan strategi pemenangan Budi Rustandi menarik untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana dominasi dinasti politik dapat runtuh melalui kekuatan kolaborasi partai dan figur kandidat yang segar di panggung politik lokal. Hasil ini menjadi dasar penting untuk memahami kekuatan politik masing-masing calon dan membuka ruang kajian tentang strategi kampanye yang mereka lakukan. Dengan demikian, pemilihan kasus Budi Rustandi menjadi sangat relevan untuk diteliti. Tidak hanya karena posisinya sebagai pemenang sementara Pilkada, tetapi juga karena latar belakang dan pendekatan strateginya dalam menghadapi kompetisi politik lokal yang kompleks.

Dalam dinamika politik lokal, strategi pemenangan menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan seorang calon dalam meraih dukungan publik. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari komunikasi politik, pengelolaan citra diri, manajemen kampanye, hingga pemetaan kekuatan lawan. Keberhasilan dalam merancang strategi yang tepat dapat mengoptimalkan potensi dukungan pemilih dan memenangkan kompetisi yang semakin kompetitif (Maulida et al., 2021).

Pilkada sebagai bagian dari proses demokrasi mengharuskan setiap calon memahami siapa pemilihnya, memanfaatkan media informasi dengan baik, serta membangun jaringan politik yang solid. Di Serang, strategi yang efektif tidak hanya bergantung pada pendekatan resmi atau formal, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai lokal, kebiasaan masyarakat, dan situasi sosial-budaya yang ada. Oleh



karena itu, strategi pemenangan tidak bisa dianggap hanya sebagai alat teknis semata. Strategi tersebut mencerminkan kemampuan calon dalam memahami situasi politik dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Pilkada Serang 2024 menjadi contoh nyata bahwa strategi yang tepat bisa memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan seorang kandidat dalam meraih suara.

Pemilihan kasus Budi Rustandi sebagai fokus penelitian bukanlah tanpa alasan. Selain menjadi pemenang sementara dalam Pilkada Serang 2024, Budi juga merepresentasikan model kepemimpinan lokal yang dibangun dari pengalaman sebagai legislator dan kedekatannya dengan masyarakat. Perolehan suaranya yang tinggi menunjukkan keberhasilannya dalam menjalankan strategi kampanye yang tepat dan efektif. Budi Rustandi juga mampu membangun komunikasi politik yang aktif dengan berbagai kelompok masyarakat, memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pemilih muda, serta membawa isu-isu yang sesuai dengan kebutuhan warga. Dari sisi akademik, kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana strategi politik modern dijalankan dalam konteks pemilihan lokal yang penuh tantangan. Dengan mengkaji kasus Budi Rustandi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika strategi politik di tingkat lokal, serta menunjukkan bagaimana seorang aktor politik daerah dapat bertahan dan menang dalam persaingan demokrasi elektoral yang kompetitif (Lingga Yonita, 2021).

Kajian tentang strategi politik dalam Pilkada semakin penting seiring dengan perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Dalam sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, memahami bagaimana strategi kampanye dirancang dan dijalankan oleh para kandidat dapat membantu menjelaskan bagaimana proses pembentukan dukungan dan legitimasi politik terjadi. Strategi kampanye yang berhasil menunjukkan kemampuan kandidat dalam berkomunikasi, menjawab isu-isu lokal, serta membangun jaringan sosial dan politik. Dalam banyak kasus, strategi yang tepat bukan hanya menentukan siapa yang menang, tetapi juga memengaruhi gaya kepemimpinan dan arah kebijakan yang akan diambil oleh kepala daerah terpilih (Sugiarto et al., 2013). Melalui



penelitian ini, penting untuk melihat strategi politik bukan hanya sebagai cara untuk mendapatkan suara, tetapi juga sebagai gambaran dari dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada di suatu daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemenangan yang digunakan oleh Budi Rustandi dalam Pilkada Serang 2024?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan strategi kampanye Budi Rustandi dalam menghadapi kandidat lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis strategi pemenangan yang diterapkan oleh Budi Rustandi dalam Pilkada Serang 2024.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi kampanye Budi Rustandi dalam menghadapi kandidat lain pada Pilkada Kota Serang 2024.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini bisa memperkaya pemahaman tentang dinamika politik lokal, khususnya dalam hal strategi pemenangan di Pilkada. Kajian ini memberi gambaran nyata tentang bagaimana calon kepala daerah seperti Budi Rustandi menyusun strategi politik di tengah persaingan yang ketat dan situasi sosial-politik yang khas di Kabupaten Serang. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan rujukan atau perbandingan dalam studi-studi sejenis, terutama yang berkaitan dengan perilaku politik pemilih, strategi kampanye, serta relasi antara partai politik, calon, dan masyarakat. Selain itu,

penelitian ini juga bisa membantu memperluas sudut pandang akademik terhadap proses demokrasi lokal yang terus berkembang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu, khususnya di tingkat lokal. Bagi para calon kepala daerah dan tim sukses, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus inspirasi untuk menyusun strategi kampanye yang lebih efektif, sesuai dengan kondisi dan karakter pemilih. Bagi partai politik, penelitian ini bisa membantu dalam memahami dinamika dukungan masyarakat dan dalam proses penjaringan calon. Sementara itu, bagi masyarakat umum, kajian ini bisa memberi pemahaman baru tentang pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak, visi, dan program calon, bukan hanya berdasarkan kedekatan emosional atau popularitas. Terakhir, bagi penyelenggara pemilu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada agar lebih adil, transparan, dan substansial.

## E. Kerangka Berfikir

Pilkada merupakan pemilihan elektoral politik tingkat lokal yang mencakupi Gubernur, Wali Kota, dan Bupati daerah setempat. Dalam praktiknya, Pilkada tidak hanya menjadi ajang pertarungan visi dan program, tetapi juga arena kekuatan politik baik dari elite lokal, partai politik, maupun jaringan dinasti politik.

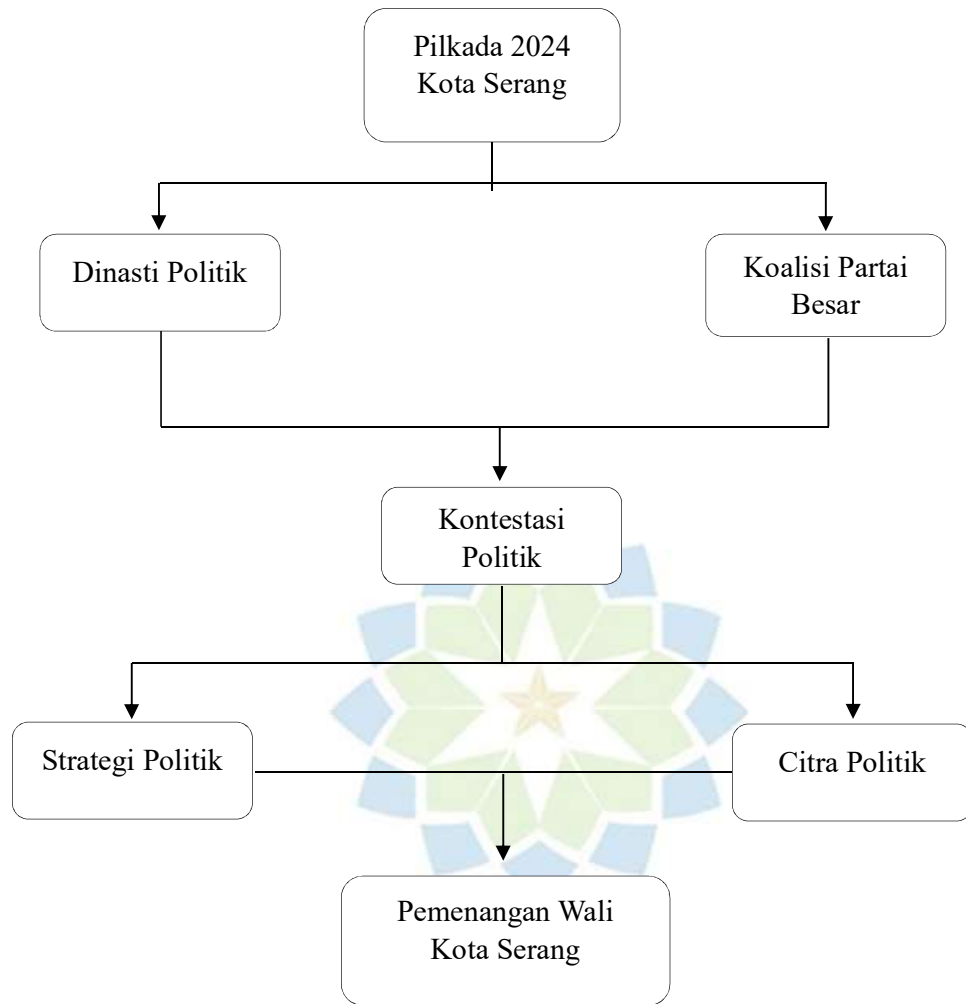
Politik dinasti di Kota Serang telah menjadi fenomena yang berlangsung cukup lama, di mana satu keluarga atau lingkaran elite tertentu terus-menerus menguasai lingkaran politik lokal. Hal ini menciptakan tantangan bagi kandidat dari luar lingkaran kekuasaan dinasti untuk bersaing secara adil. Terlebih, koalisi partai yang besar dan dominan juga sering kali membentuk hegemoni politik tersendiri yang mempersempit ruang kompetitif bagi kandidat lain.

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Serang, Budi Rustandi muncul sebagai kandidat yang berhasil memenangkan kompetisi politik melawan kandidat dari politik dinasti, serta menghadapi koalisi partai yang lebih besar secara struktur.

Keberhasilannya bukan semata hasil dari dukungan partai pengusung, tetapi juga dari strategi kampanye yang efektif yakni, kemampuan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat, serta pendekatan komunikasi yang populis. Penelitian ini berjudul “Strategi Pemenangan Budi Rustandi Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Kota Serang” berusaha mengkaji strategi politik yang dilakukan Budi Rustandi dalam memenangkan Pilkada 2024 Kota Serang ditengah sistem politik dinasti.

Penulis akan menggambarkan dan menjelaskan alur penelitian melalui kerangka berpikir seperti berikut:





Gambar 1. 2 Skema  
Kerangka Berpikir Diolah  
oleh peneliti

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari realita politik pada Pilkada 2024 Kota Serang, yang ditandai oleh tebalnya kontestasi antara kekuatan politik mapan. Dua kekuatan utama yang mendominasi arena politik lokal tersebut adalah keberadaan dinasti politik dan koalisi partai besar. Dinasti politik di Kota Serang telah lama mengakar, menciptakan jaringan kekuasaan yang kuat dan memengaruhi proses pencalonan serta arah dukungan politik.

Di tengah konfigurasi kekuatan tersebut, Pilkada 2024 menjadi ajang pertarungan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan elektoral tradisional, melainkan juga kreativitas dan kecerdikan dalam merancang strategi kemenangan.

Salah satu figur yang berhasil menembus dominasi tersebut adalah Budi Rustandi. Keberhasilannya menjadi menarik untuk diteliti karena ia bukan bagian dari dinasti politik yang berkuasa dan berhasil menang meski menghadapi lawan dari koalisi partai besar.

Untuk menjelaskan keberhasilan tersebut, penelitian ini menyoroti dua aspek utama: strategi politik dan citra politik. Strategi politik mencakup perencanaan kampanye, pendekatan kepada masyarakat, penggunaan media, serta model komunikasi politik seperti push, pull, dan pass marketing. Di sisi lain, citra politik menyangkut bagaimana Budi Rustandi membangun identitas politik yang dekat dengan rakyat, responsif terhadap isu lokal, serta mampu membangun kedekatan emosional dengan pemilih, terutama kalangan muda. Kombinasi antara strategi yang adaptif dan citra yang positif inilah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemenangan Budi Rustandi sebagai Wali Kota Serang.

